

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA

Ilham Surya Maulana, Budi Puspo Priyadi, Ida Hayu Dwimawanti

Program Studi S1Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the development strategy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) implemented by the Department of Cooperatives, MSMEs, Manpower, and Transmigration of Jepara Regency. The main focus of this research is on the food and beverage processing sector, which dominates the local economy but still faces structural and managerial challenges in its development. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews with five MSME actors, three structural officials from the department, and one representative from a local MSME association. The findings show that the development strategies implemented by the Department of Cooperatives, MSMEs, Manpower, and Transmigration have not been fully optimal and are not yet well integrated with the actual needs on the ground. The situation diagnosis reveals that the growth of MSMEs in Jepara remains quantitative, lacking parallel improvement in human resource capacity, market access, and institutional support systems. The guiding policies remain general and are not based on micro-level data reflecting the specific characteristics of each MSME sector. Meanwhile, the actions taken have yet to establish a sustainable empowerment pattern. This study concludes that a reformulation of MSME development strategies is needed through a more integrative and locally responsive approach. Stronger cross-sectoral collaboration, field-based needs assessment, and consistent evaluation systems are essential to ensure the sustainability and long-term impact of empowerment programs.

Keywords: *Development Strategy, MSMEs, Diskopukmnakertrans*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Fokus utama penelitian ini adalah pada sektor UMKM makanan dan minuman, yang merupakan salah satu sektor dominan dalam struktur ekonomi lokal, namun masih menghadapi hambatan struktural dan manajerial dalam proses

pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada lima pelaku UMKM, tiga pejabat struktural dinas terkait, dan satu ketua paguyuban UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM yang telah dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Diagnosis situasi mengindikasikan bahwa pertumbuhan UMKM di Jepara masih bersifat kuantitatif tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pasar, serta struktur pendukung kelembagaan yang kuat. Panduan kebijakan yang diterapkan dinas masih bersifat umum dan belum berbasis data mikro terhadap karakteristik tiap sektor UMKM. Sementara itu, tindakan yang dilaksanakan belum membentuk pola pemberdayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi strategi pengembangan UMKM dengan pendekatan yang lebih integratif dan responsif terhadap kondisi lokal. Diperlukan sinergi antar-sektor, pemetaan kebutuhan berbasis data lapangan, serta sistem evaluasi yang berkesinambungan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan berdampak jangka panjang.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, UMKM, Diskopukmnakertrans

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang biasa dikenal sebagai UMKM, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang menjadi bagian dari Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Sebagaimana dicatat oleh Halim (2020:18), UMKM merujuk pada bisnis yang menghasilkan produk dan layanan dari bahan baku dasar, memanfaatkan sumber daya alam, keterampilan, dan kerajinan seni tradisional setempat.

Saat ini, pengaturan yang mengatur standar UMKM tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kriteria UMKM terkini tertuang dalam Pasal 36 PP UMKM. PP ini ditetapkan berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Data UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM (Juta)	Pertumbuhan (%)
2020	64	-2,24
2021	65,46	2,28
2022	65	-0,70
2023	66	1,52
2024	66,2	0,55

Sumber: KemenkopUKM, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah pelaku UMKM tiap tahunnya mengalami sejumlah peningkatan selain pada tahun 2020 ketika terjadi wabah Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian seluruh masyarakat. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.

Hingga tahun 2024, meskipun perannya dalam lapangan pekerjaan cukup besar, UMKM baru berkontribusi sekitar 61 persen terhadap total Produk Domestik

Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan besarnya potensi UMKM yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian nasional. Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2024 dimana hanya 20 persen UMKM yang berhasil meningkatkan operasinya selama lima tahun terakhir. Tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendanaan, kemampuan manajemen yang tidak memadai, dan keterlibatan terbatas di pasar ekspor sering kali menghambat UMKM sehingga membuatnya tetap terikat pada kategori mikro atau kecil.

Pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Jepara menjadi tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Diskopukmnakertrans sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2024, jumlah UMKMK di Kabupaten Jepara menunjukkan angka sebanyak 82.249 usaha dimana jumlah ini lebih banyak dibanding daerah-daerah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki upaya pengembangan UMKM yang baik dibanding daerah sekitarnya yang tentunya mampu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.

Serapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Kabupaten Jepara

Tahun	Serapan Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
2021	213.485	1.188.510	17,96
2022	213.605	1.192.811	17,91
2023	215.371	1.264.598	17,03
2024	218.355	1.283.687	17,01

Sumber: Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM yang mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah UMKM belum diiringi dengan perluasan kapasitas usaha atau penciptaan lapangan kerja yang signifikan.

Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk membina UMKM menghadapi beberapa tantangan. Pertama, upaya pemberdayaan tidak memadai terutama dari seminar dan lokakarya singkat yang berlangsung 2-3 hari yang secara signifikan membatasi efektivitasnya dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi di antara peserta UMKM. Kedua, kurang adanya sarana promosi untuk memperkenalkan produk UMKM pada media digital di Kabupaten Jepara. Ketiga, kurangnya pendampingan dari Diskopukmnakertrans dalam hal penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan menjadi salah satu kendala utama. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan usahanya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis kualitatif dengan teori strategi Richard Rumelt, yang belum banyak diterapkan dalam konteks pengembangan UMKM di daerah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan spesifik pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. sehingga mampu menjembatani antara dokumen formal dinas dan realita pelaksanaan program di lapangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan merinci semua data atau

kondisi yang melingkupi subjek atau objek penelitian diikuti dengan analisis dan perbandingan berdasarkan keadaan yang ada pada akhirnya bertujuan untuk menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan memberikan informasi terkini yang berkontribusi pada kemajuan pengetahuan. Lokus penelitian dilakukan di Kabupaten Jepara dengan fokus utama pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi yang bertanggung jawab langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan dari Richard Rumelt (2011) sebagai berikut:

1. **Diagnosis Situasi**
Analisis internal dan analisis eksternal
 2. **Panduan Kebijakan**
Dokumen perencanaan strategis, kebijakan sektoral, dan prinsip pendekatan kebijakan
 3. **Tindakan yang Koheren**
Koordinasi antarprogram, evaluasi dan keberlanjutan, dan konsistensi antar unit
- Subjek penelitian adalah perwakilan Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, ketua paguyuban UMKM, dan pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 19 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan UMKM yang memandatkan pemerintah daerah untuk

memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Perda ini diperkuat melalui Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang memuat empat arah kebijakan utama dalam pengembangan UMKM.

Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menggunakan pendekatan strategi Richard Rumelt (2011). Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga pilar utama teori strategi: diagnosis situasi, panduan kebijakan, dan tindakan yang koheren.

1. Diagnosis Situasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jepara lebih menonjol secara kuantitatif namun belum diiringi dengan penguatan kualitas usaha. Data serapan tenaga kerja menunjukkan tren penurunan proporsional meskipun jumlah UMKM meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, serapan tenaga kerja mencapai 17,96 persen dari jumlah penduduk, dan menurun menjadi 17,01 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih bersifat usaha rumah tangga (*self-employed*) dan belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Selain itu, diagnosis terhadap pelaku usaha di sektor pengolahan menunjukkan bahwa sebagian besar masih mengalami kendala dalam pemasaran, pembukuan, dan digitalisasi. Pelaku UMKM menyatakan belum pernah mendapatkan evaluasi pasca program pelatihan atau bantuan, serta minim pendampingan langsung.

2. Panduan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panduan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam pengembangan UMKM telah dituangkan secara formal melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023–2026. Renstra tersebut memuat empat pilar utama strategi, yakni: pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, dan koordinasi; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku UMKM; pengembangan usaha mikro dengan orientasi naik kelas menjadi usaha kecil; serta fasilitasi dalam aspek produksi, pemasaran, SDM, dan teknologi.

Namun berdasarkan temuan lapangan, kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang telah terdiagnosis secara mendalam. Pelaksanaan kebijakan masih cenderung bersifat umum, administratif, dan belum difokuskan pada pemetaan sektoral, padahal sektor seperti pengolahan memiliki potensi ekonomi lokal yang besar. Selain itu, pendekatan yang digunakan belum membedakan antara pelaku usaha pemula, berkembang, dan yang siap ekspansi. Program pelatihan, bantuan alat, dan promosi masih dilakukan dengan pendekatan seragam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan pengembangan UMKM telah diformalkan melalui dokumen perencanaan daerah, dalam praktiknya belum sepenuhnya menjadi panduan yang efektif dan kontekstual. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa program yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan skala usaha dan serapan tenaga kerja secara signifikan.

3. Tindakan yang Koheren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum sepenuhnya berjalan secara koheren. Berdasarkan teori Rumelt, tindakan yang koheren seharusnya merupakan serangkaian langkah yang saling mendukung dan diarahkan langsung oleh diagnosis situasi serta panduan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun di lapangan, ditemukan adanya ketidakterpaduan antarprogram yang menyebabkan efektivitas strategi menjadi terbatas.

Beberapa program strategis seperti pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, dan promosi produk melalui *platform* digital *MyUMKM*, tampak berjalan secara terpisah tanpa kesinambungan. Misalnya, pelatihan hanya diberikan satu kali tanpa ada sistem pendampingan atau monitoring berkelanjutan. Bantuan alat produksi juga tidak selalu disertai pelatihan teknis penggunaannya, sehingga pemanfaatannya menjadi tidak optimal. Demikian pula dengan promosi produk UMKM secara digital, yang belum terintegrasi dengan kegiatan pelatihan pemasaran maupun pendampingan *branding*.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha terungkap bahwa setelah mengikuti pelatihan atau menerima bantuan, mereka tidak lagi dihubungi atau didampingi oleh pihak dinas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak menghasilkan transformasi usaha yang nyata. Bahkan, beberapa pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui bagaimana mengakses kembali bantuan atau mengikuti program lanjutan karena tidak adanya komunikasi dan sistem pelaporan yang terstruktur.

Selain itu, koordinasi antarbidang dalam dinas juga dinilai belum maksimal. Bidang yang menangani pelatihan, promosi, dan pendampingan seringkali bergerak sendiri-sendiri, tanpa sinergi atau sistem penilaian kinerja yang mengukur keberhasilan program secara komprehensif. Hal ini berkontribusi terhadap lemahnya

daya dorong strategi dalam mendorong UMKM naik kelas, baik dari sisi produktivitas, akses pasar, maupun kontribusi terhadap serapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang telah dilaksanakan belum saling memperkuat dan tidak sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan strategis yang telah didiagnosis. Program-program yang ada masih bersifat administratif dan seremonial, belum menjadi instrumen strategis yang terintegrasi dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan dalam hal pelaksanaan program, mekanisme koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang menyeluruh agar strategi pengembangan UMKM dapat berjalan lebih sistematis dan berdampak nyata.

Hal-Hal yang Menghambat Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat terdapat tiga faktor utama yang secara signifikan menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara, yaitu: kurang optimalnya sarana promosi produk UMKM, keterbatasan dalam pendampingan, serta minimnya dukungan terhadap penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap belum tercapainya tujuan strategis UMKM naik kelas sebagaimana yang dirancang dalam dokumen Renstra Dinas.

1. Sarana Promosi Produk Usaha UMKM

Sarana promosi merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks Kabupaten Jepara, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi masih menjadi salah satu titik lemah yang menghambat ekspansi pasar produk UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman yang memiliki daya saing tinggi

namun belum didukung strategi pemasaran yang kuat.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebenarnya telah mengembangkan beberapa program promosi, termasuk penyelenggaraan pameran, fasilitasi desain kemasan, dan pengembangan *platform* digital seperti *MyUMKM*. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, diketahui bahwa pemanfaatan sarana promosi tersebut masih sangat terbatas dan belum merata di kalangan pelaku UMKM.

Masalah lainnya adalah minimnya pelatihan pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik sektor usaha. Program pelatihan yang diberikan oleh dinas lebih banyak bersifat teknis produksi, seperti pembuatan makanan atau pengolahan produk, tanpa dibarengi materi pemasaran dan distribusi. Hal ini membuat pelaku usaha tidak hanya kesulitan dalam menjual produknya ke pasar yang lebih luas, tetapi juga tidak memiliki strategi promosi berkelanjutan. Selain itu, kegiatan promosi kolektif seperti pameran atau bazar UMKM seringkali bersifat musiman dan seremonial. Tidak semua UMKM diberi kesempatan untuk tampil atau memperoleh ruang promosi yang adil. Pelaku UMKM yang belum terhubung dengan paguyuban atau jaringan koperasi seringkali tertinggal dalam informasi kegiatan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana promosi yang seharusnya menjadi pengungkit utama pertumbuhan usaha, belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses, pelatihan, dan pendampingan teknis. Jika tidak dibenahi, maka pelaku UMKM akan kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, dan produk lokal Jepara akan kalah bersaing meskipun memiliki kualitas yang kompetitif. Oleh karena itu, promosi harus dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dengan strategi pengembangan UMKM lainnya dan bukan hanya program tambahan

atau simbolik. Perlu penguatan dalam hal pelatihan pemasaran digital, integrasi dengan *platform* e-commerce, serta pendampingan *branding* produk secara berkelanjutan.

2. Pendampingan UMKM

Pendampingan merupakan bagian penting dalam strategi pengembangan UMKM karena berfungsi sebagai penghubung antara pelatihan, bantuan, dan keberlanjutan usaha. Dalam implementasinya, pendampingan seharusnya memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun penguatan kapasitas usaha secara menyeluruh. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan UMKM di Kabupaten Jepara belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat tidak berkelanjutan.

Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan atau menerima bantuan alat produksi dari dinas, mereka tidak lagi mendapatkan bimbingan atau kunjungan lanjutan dari pihak terkait. Tidak ada tindak lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana alat tersebut digunakan, apakah pelatihan memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas usaha, atau apakah pelaku usaha mengalami hambatan teknis pascaprogram. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan masih bersifat sporadis dan belum menjadi sistem yang terstruktur di bawah kebijakan yang berjalan. Padahal dalam kerangka strategi menurut Rumelt (2011), tindakan yang koheren memerlukan integrasi antara pelatihan, pendampingan, bantuan, dan evaluasi. Tanpa pendampingan yang konsisten, pelatihan hanya menjadi kegiatan seremonial, dan bantuan alat dapat menjadi tidak efektif.

Selain itu diketahui bahwa jumlah tenaga pendamping sangat terbatas, dan belum ada pemetaan wilayah maupun sektor yang menjadi fokus pembinaan. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman yang memiliki

potensi pertumbuhan tinggi tidak mendapatkan perhatian khusus atau pendampingan sektoral. Ketiadaan sistem monitoring dan pelaporan juga memperparah lemahnya pendampingan. Dinas lebih banyak mengevaluasi kegiatan berdasarkan jumlah pelatihan yang diselenggarakan atau jumlah peserta, bukan pada kualitas keberhasilan pendampingan. Pelaku UMKM pun tidak mengetahui ke mana harus melapor atau berkonsultasi jika mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha pasca-pelatihan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi pengembangan UMKM belum sepenuhnya diarahkan pada pembinaan jangka panjang yang terintegrasi, melainkan lebih menekankan pada program-program teknis yang berdiri sendiri. Pendampingan seharusnya menjadi bagian dari sistem manajemen pembinaan UMKM, agar pelaku usaha benar-benar mendapatkan bimbingan untuk bertumbuh, berinovasi, dan naik kelas.

3. Bantuan Penyusunan Pembukuan dan Administrasi

Pembukuan dan administrasi keuangan merupakan fondasi dasar dalam pengelolaan usaha yang sehat dan profesional. Tanpa pencatatan yang baik, pelaku UMKM akan kesulitan mengukur keuntungan, menetapkan harga pokok produksi, melakukan perencanaan usaha, maupun mengakses pembiayaan formal seperti pinjaman usaha atau kemitraan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan masih menjadi aspek yang terabaikan dalam strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara.

Sebagian besar pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini, khususnya di sektor makanan dan minuman, menyatakan belum pernah menerima pelatihan atau pendampingan terkait pencatatan keuangan, baik secara manual maupun digital. Mereka mengelola

keuangan secara sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak memiliki laporan keuangan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha tidak menyadari seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh, serta kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara belum memiliki program khusus yang fokus pada peningkatan kapasitas pembukuan UMKM secara berkelanjutan. Pelatihan akuntansi usaha mikro belum menjadi prioritas dan jika ada, hanya diberikan dalam skala terbatas serta tidak dilanjutkan dengan pendampingan. Tidak terdapat pula modul pembukuan sederhana yang dapat digunakan secara mandiri oleh pelaku usaha untuk mencatat transaksi harian.

Kurangnya perhatian terhadap aspek keuangan ini berdampak langsung pada kesulitan pelaku UMKM dalam mengakses dukungan dari lembaga keuangan, koperasi, maupun program pemerintah lainnya yang mensyaratkan kelayakan usaha berbasis laporan keuangan. Selain itu, ketidakteraturan dalam pencatatan keuangan membuat pelaku UMKM tidak dapat mengevaluasi usahanya secara objektif, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang strategis dalam pengembangan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minimnya bantuan dalam penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam upaya mendorong UMKM naik kelas di Kabupaten Jepara. Untuk mencapai penguatan kelembagaan dan kemandirian usaha, dibutuhkan perhatian lebih besar terhadap aspek keuangan melalui pelatihan terstruktur, modul yang mudah diakses, dan pendampingan berkelanjutan yang menysasar kebutuhan nyata pelaku usaha mikro.

PENUTUP

Kesimpulan

Strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara belum berjalan secara optimal baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Strategi yang diterapkan memang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra 2023–2026, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan substansial yang menyebabkan pengembangan UMKM berjalan lambat dan belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan skala usaha maupun serapan tenaga kerja. permasalahan utama yang dihadapi terletak pada belum adanya pemetaan sektoral yang komprehensif menyebabkan strategi dinas tidak fokus pada sektor unggulan seperti pengolahan yang memiliki potensi besar. kebijakan yang diambil dinas belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada. Pendekatan yang digunakan masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro yang beragam. tindakan nyata di lapangan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Pelatihan, bantuan alat, promosi digital, dan evaluasi belum saling menguatkan sebagai rangkaian strategi.

Selain itu, penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menjadi hambatan pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara, yaitu: 1) keterbatasan dalam pemanfaatan sarana promosi produk secara digital maupun kolektif, 2) tidak tersedianya sistem pendampingan berkelanjutan yang terstruktur berdasarkan sektor atau wilayah, serta 3) rendahnya kapasitas pencatatan pembukuan dan administrasi keuangan pelaku usaha. Ketiga faktor ini secara langsung menghambat upaya pengembangan kualitas UMKM, bahkan di sektor yang berpotensi tinggi seperti sektor pengolahan.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan UMKM yang ada saat ini

masih perlu ditinjau ulang, terutama dalam hal orientasi sektoral, integrasi lintas program, serta penguatan tindakan lapangan yang berkelanjutan. Tanpa pembenahan pada tiga pilar utama strategi diagnosis yang tajam, kebijakan yang terarah, dan tindakan yang terkoordinasi maka target penguatan UMKM dan peningkatan kontribusinya terhadap pembangunan daerah akan sulit tercapai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran-saran yang dapat diajukan untuk perbaikan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara, yaitu:

1. Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara perlu menyusun strategi berbasis pemetaan sektor dan kebutuhan masing-masing kelompok usaha. Perlu ada sistem informasi yang memetakan kekuatan, kendala, dan potensi UMKM agar intervensi program lebih tepat sasaran.
2. Pelatihan tidak cukup dilakukan satu kali, melainkan harus menjadi program berkelanjutan dengan pendampingan intensif. Pendamping harus disesuaikan dengan jenis usaha, memiliki keahlian spesifik, dan terlibat dalam proses evaluasi usaha.
3. Dinas perlu menyediakan modul pembukuan sederhana yang mudah diterapkan, disesuaikan dengan jenis usaha. Pemanfaatan aplikasi pencatatan digital harus difasilitasi dan diajarkan melalui pelatihan teknis.
4. Setiap kegiatan dan program yang telah dijalankan harus dievaluasi secara sistematis, melibatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perencanaan program selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, M., Ghozali, I., & Suharto, S. (2019). *Manajemen UMKM di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ANGGUN, T. (2022). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Pada Usaha Pengolahan Kerupuk Mekar Sari di Karangklesem, Purwokerto Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BI Press.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary* (2nd ed.). Santa Barbara: ABC-CLIO.
- David, F. R. (2012). *Strategic Management: Concepts and Cases* (13th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Dinas Koperasi UKM Kabupaten Jepara. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jepara Tahun 2022*. Jepara: Dinas Koperasi dan UKM.
- Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. (2023). *Data Serapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Kabupaten Jepara Tahun 2023*. Jepara: Diskopukmnakertrans.
- Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. (2024). *Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2020–2024*. Jepara: Diskopukmnakertrans.
- Disli, M., Aysan, A. F., & Abdelsalam, O. (2023). Favoring the small and the plenty: Islamic banking for MSMEs. *Economic Systems*, 47(1), 101051.
- Fitriani, D., & Sari, R. M. (2022). *Strategi Pemasaran Digital pada UMKM*

- Kuliner di Masa Pandemi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 67–78.
<https://doi.org/10.31294/jmb.v10i1.9876>
- Hakam, I. A., Fatahillah, K., Faniati, R. N., Izzah, N. N., & Putra, R. S. (2023). A Systematic Literature Review: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah (Umkm) Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)*, 2(1), 61–72.
- Halim, A. (2020). *Ekonomi UMKM dan Kewirausahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamidah, A., Wahyudi, S., & Rahmawati, N. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 23–34.
- Handayani, R., & Prabowo, M. A. (2023). Evaluasi Program Pendampingan UMKM oleh Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 145–158.
<https://doi.org/10.24843/jkp.2023.v18.i2.p145>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Holiseh, H., & Izzatusholekha, I. (2023). Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi Umkm. *PENTAHHELIX*, 1(2), 201–216.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2021). *Strategic Management and Business Policy (15th ed.)*. New York: Pearson.
- Isnaini, N., & Kurniawan, T. (2021). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kapasitas Manajerial UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9(3), 205–214.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- KemenKopUKM. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Profil UMKM Indonesia 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The influence of e-payment and e-commerce services on supply chain performance: Implications of open innovation and solutions for the digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119.
- Lin, J. Y., Yang, Z., Li, Y., & Zhang, Y. (2022). Development strategy and the MSMEs finance gap. *Journal of Government and Economics*, 5, 100034.
- McCurdy, H. E. (1986). *Public Administration: A Bibliographic Guide to the Literature*. New York: Garland Publishing.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Nawawi, H. (2017). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Overman, E. S. (1993). Managing Public Organizations. In J. L. Perry (Ed.), *Handbook of Public Administration* (pp. 61–75). San Francisco: Jossey-Bass.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Afandi, M. A. (2021). *Manajemen Strategi dalam*

- Administrasi Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, N., & Wibowo, A. (2024). Model Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovasi*, 6(1), 88–101.
- Ramadhan, A., & Barus, M. A. (2023). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BANGSA. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(6), 786-790.
- Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. New York: Crown Business.
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*.
- Soerjono, S., et al. (2021). *Hukum dan UMKM*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, D. H., Nurahman, D., & Muhadi, M. (2022). Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 52-56.
- Tarihoran, A. D. B., Hubeis, M., Jahroh, S., & Zulbainarni, N. (2023). Market-based dynamic capabilities for MSMEs: Evidence from Indonesia's ornamental fish industry. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100123.
- Widiyanto, W. (2020). Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Digitalisasi dalam Menghadapi Era Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 112–123.
- Yuliana, D. (2021). *Panduan Praktis Penulisan Skripsi Kualitatif*. Surabaya: Unesa Press.
- Yuliana, E., & Lestari, S. (2022). Pengaruh Pendampingan dan Akses Informasi Terhadap Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 8(1), 45–54.
- Yusuf, M. F., & Ramadhani, D. (2022). Pembukuan UMKM dan Literasi Keuangan: Studi di Sentra UMKM Pangan. *Jurnal Keuangan Mikro*, 11(1), 57–66